

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Akbar, Patrialis. 2013. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945.
Jakarta: Sinar Grafika.

Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2004. Metode Penelitian Hukum.
Surakarta: UMS Perss.

Fuady, Munir. 2014. Konsep Hukum Perdata. Depok: Rajawali Press.

Gosita, Arif. 1989. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo.

Hartanto, J. Andi. 2008. Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin
Menurut KitabUndang-Undang Hukum Perdata. Yogyakarta: Laksbang
Presindo.

Hasan, Burhanudin dan Harianto Sugiono. 2015. Hukum Acara dan Praktik
Peradilan Perdata, Bogor: Ghalia Indonesia.

Irfan, M. Nur. 2012. Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam. Jakarta:
Amzah.

Muhammad, Abdulkadir.2014. Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT.Citra
Aditya Bakti.

Prodjodikoro, Wirjono. 2014. Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung:
Vorkink-Van Hoeve.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1990. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali.

Soemitro, Romy Hanitjo. 1982. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sosroatmojo, Arso dan Wasit Aulawi. 1975. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang.

Sukardi. 2004. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara

Thalib, Abdul Rasyid Thalib. 2006. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Utuh, Harun. 1990. Status Hukum Anak Luar Kawin dan Perlindungannya. Surabaya: PT.Bina Ilmu

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 1998. Fiqh Wanita. Penerj. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka al- Kautsar.

B. JURNAL DAN MAKALAH

Djumikasih. 2013. Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Akta Kelahiran Anak Luar Kawin. Jurnal Arena Hukum. 6(2): 205

Fira Mubayyinah. 2014. Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin. Jurnal AL-HIKMAH Studi Keislaman. 4 (1): 45.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemerintah Indonesia. 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 1. TLN No. 3019. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 1975. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 1. TLN No. 3019. Jakarta: Sekretariat Negara.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010

Fatwa MUI Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

Pemerintah Indonesia. 2006. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas Perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 124. TLN No.4672

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 297. TLN No. 5606. Jakarta: Sekretariat Negara.

D. INTERNET

DalamIslam.com. 2016. Fiqih Pernikahan: Pengertian, Hukum, dan Rukunya di <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/fiqih-pernikahan> (diakses 8 Juni)

Srikandi Rahayu. 2014. Pengertian Ihram dalam Ibadah Haji. di <http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/09/pengertian-ihram-dalam-ibadah-haji.html> (diakses 6 September)

Sartika. 2015. Metodologi Penelitian Deskriptif, Komparatif, Kausal. di <http://penelitiandeskriptifkomparatifkausal.blogspot.com/2015/03/metodologi-penelitian-deskriptif.html>. (diakses 26 Maret)

Ahmad Arissandi. 2016. Akta Pengesahan/Pengakuan Anak di <https://aturanpemerintah15.blogspot.com/2016/08/akta-pengesahan-pengakuan-anak.html> (diakses 25 Agustus)

Detik News. 2012. MUI Nilai Keputusan MK Soal Status Anak Luar Nikah Overdosis. di <https://news.detik.com/berita/d-1866192/mui-nilai-keputusan-mk-soal-status-anak-di-luar-nikah-overdosis> (diakses 13 Maret)

Hukum Online. 2012. Putusan MK Berpengaruh pada Hukum Waris. di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f41e31435676/putusan-mk-berpengaruh-pada-hukum-waris-> (diakses 20 Februari)

E. WAWANCARA

Dr. Eddy Parulian Siregar S.H., M.H. , Hakim Pengadilan Negeri Semarang,

Wawancara Pribadi, 2019.

Drs. M.Rizal S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Semarang, Wawancara Pribadi, 2019.

Meta Natalia, S.H., M.Kn., Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, Wawancara Pribadi 2019.